

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN
AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Periode 2009-2011**

Renas, Dul Muid¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

Role of Government as public service and target development country become a better service. Therefore, this government have a control system, evaluation, and measurement performance achieved by local government. This study aims to analyze and examine to influence characteristics local government and audit findings BPK for performance Local Government District/Cities. Data were analyzed using Multiple linear regression analysis on 105 samples of local government report for year 2009, 2010, 2011, the study was able to prove that the wealth and status have positive significant effect on performance. Size, intergovernmental expenditure, capital expenditure and audit findings have negative significant affect the performance of the local government district/cities in the Central Java Province.

Keywords: Characteristics Local Government, Audit Findings,, Local Government District/Cities performance, Measurement performance.

PENDAHULUAN

Pada era otonomi terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dipicu dengan adanya krisis moneter dan transisi politik sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (UU No. 22/1999) tentang "Pemerintah Daerah" dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 (UU No. 25/1999) tentang "Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah".

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Sebagai dampak tersebut, peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemda.

Menurut Mardiasmo (2002) beberapa misi yang terkandung dalam otonomi daerah, *Pertama*, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. *Kedua*, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Otonomi kepada daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah (seperti pada negara federal). Otonomi bersifat nyata karena memerlukan kewenangan untuk menyelenggarakan, tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan disebut otonomi bersifat bertanggungjawab karena pemerintah pusat telah menyerahkan kewenangan kepada daerah demi pencapaian tujuan otonomi daerah. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik, kehidupan yang demokratis, adil, rata, dan hubungan yang serasi dalam Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*) (Mardiasmo, 2002). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik sehingga dapat tercapainya penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Mustikarani dan Fitrasari (2012), menguji pengaruh karakteristik pemda dengan proksi variabel ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah (*size*, *wealth*, status, dana perimbangan, belanja daerah) dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011. Penelitian ini meneliti karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara keseluruhan maupun secara perkomponen penyusunannya.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berdasarkan Teori Agensi (*Agency Theory*), Jensen dan Meckling (Jensen, 1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Teori agensi ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah karena adanya desentralisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan dapat mengatur otonomi daerahnya masing-masing.

Selain itu, terdapat konflik kepentingan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Konflik kepentingan ada hal positif maupun hal negatif. Hal positif dalam konflik kepentingan tersebut adalah dapat memberikan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah baik berupa keuangan maupun non keuangan seperti belanja pegawai, belanja daerah, maupun perbaikan reformasi birokrat pegawai.

Konflik kepentingan dalam hal negatif adalah perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*). Perilaku oportunistik ini dapat memanfaatkan informasi keuangan yang lebih dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga dapat berakibat penyimpangan anggaran. Penyimpangan anggaran ini karena adanya pihak prinsipal dan pihak agen melakukan kontrak politik anggaran. Dampak dari perilaku tersebut, adanya kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang cenderung memaksimalkan utiliti (*self-interest*) dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya Penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 31,5% dan secara parsial menunjukkan bahwa variabel *size* dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) untuk membuktikan bahwa karakteristik suatu pemerintah daerah (ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dan belanja daerah) dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota untuk dengan menggunakan beberapa metode regresi untuk 275 PEMDA untuk tahun 2007. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemda dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda.

Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan, besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah

Pengaruh Tingkat Kekayaan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penelitian mengenai PAD, salah satunya dilakukan oleh Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap jumlah belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara PAD dengan kinerja pemerintah daerah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Status Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) disebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur undang-undang. Analisis atas pengaruh status/jenis daerah dalam penelitian ini perlu untuk memberikan bukti bahwa kelengkapan pengungkapan wajib berkaitan dengan status daerah sebagai kota atau kabupaten (Abdullah, 2004).

Status daerah berpengaruh pada pendapatan suatu daerah tersebut sehingga masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan anggaran dengan tujuan transparansi atau keterbukaan dalam anggaran. Di era globalisasi ini, pengetahuan masyarakat mengenai terselenggaranya pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota semakin meningkat sehingga pemerintah harus mengembangkan daerah masing-masing seperti potensi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : status daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No.32 Tahun 2008 (Permendagri No.32/2008) dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*.

Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat *Block Grant* yang artinya penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Virgasari (2009) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi antara DAU dengan kinerja keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian Indararti (2011) yang menyimpulkan bahwa DAU memiliki korelasi yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdulah, 2006).

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Purba (2006) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun dan Rustiono (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅ : belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pemeriksaan dan koreksi. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka akan semakin rendah kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian yang menghubungkan temuan audit dengan kinerja pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu.

Dengan mengacu pada penelitian diatas dapat dirumuskan dalam hipotesis terakhir penelitian ini

H₆: Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Ukuran Daerah

Variabel ukuran daerah dalam penelitian ukuran (*size*) dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi. Damanpour (1991, dalam Suhardjanto, dkk, 2011). Penelitian ini menggunakan variabel ukuran menggunakan logaritma natural (Ln) dari total pendapatan. Total pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

2. Tingkat Kekayaan Daerah

Variabel tingkat kekayaan daerah dalam penelitian (*wealth*) dapat diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 disebutkan bahwa PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

3. Status Daerah

Variabel tingkat status daerah dalam penelitian (*status*) dapat diukur dengan menggunakan angka *dummy*. Kode 0 untuk Kabupaten dan kode 1 untuk kota.

4. Dana Perimbangan

Variabel dana perimbangan dalam penelitian dapat diukur dengan total dana perimbangan. Total dana perimbangan dapat diperoleh dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

5. Belanja Daerah

Variabel belanja daerah dalam penelitian dapat diukur dengan belanja modal. Belanja modal ini dapat diperoleh belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

6. Temuan Audit BPK

Untuk mengetahui temuan audit suatu daerah dapat dilakukan dengan memberikan opini atas temuan audit, jika Opini Tanpa Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), diberi skor 0 (nol), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi skor 1 (satu), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi skor 2 .

Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Hilmi (2010) yaitu dengan menggunakan jumlah temuan audit pemeriksaan (BPK) atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai proksi dalam mengukur temuan audit.

7. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk menilai apakah kinerja Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah baik atau belum, perlu mengacu pada data. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah.

Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2011.

Tabel 1
Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah	35
Data neraca Pemda , Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, dana perimbangan , dan total realisasi anggaran pendapatan, pemeriksaan atas ketidakpatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2009-2011, data kinerja pemda.	35
Jumlah Tahun Pengamatan	3
Jumlah total data selama tahun penelitian 2009-2011	105

Metode analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$(KNRJ) = \beta_a + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{WEALTH} + \beta_3 \text{STAT} + \beta_4 \text{DP} + \beta_5 \text{BD} + \beta_6 \text{TEMUAN} + e$$

β_a	: Konstanta
SIZE	: Ukuran daerah, yang diukur dari Ln total pendapatan
WEALTH	: Tingkat Kekayaan daerah, yang dihitung dari pendapatan asli daerah dengan total pendapatan
DP	: Dana Perimbangan, yang dihitung dari total dana perimbangan dengan total pendapatan
STAT	: Status Daerah, dengan variabel <i>dummy</i>
BD	: Belanja Daerah, yang dihitung dari belanja modal dengan total belanja
Temuan	: Temuan audit

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	105	26.5760	28.1696	27.3909	0.3237
KEKAYAAN	105	0.0538	0.2494	0.0954	0.0361
BD	105	0.0279	0.3312	0.1348	0.0511
PERIMBANGAN	105	0.5562	0.8905	0.7936	0.0671
KINERJA	105	67.6900	78.1800	72.4766	2.2005
Valid N (listwise)	105				

Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa Ukuran daerah diukur dengan menggunakan total pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah daerah. Rata-rata Ukuran Daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2009-2011 setelah transformasi logaritma natural (ln) menunjukkan rata-rata sebesar 27,3909. Nilai Ukuran daerah terendah adalah sebesar 26,5760 yaitu pada Kota Salatiga tahun 2009 sedangkan Ukuran Daerah tertinggi mencapai 28,1696 pada Kota Semarang tahun 2011.

Tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio antara PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2009-2011 menunjukkan rata-rata sebesar 0,0954. Hal ini berarti bahwa hanya 9,54% seluruh pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Tingkat kekayaan daerah terendah adalah sebesar 0,0538 pada Kabupaten Klaten tahun 2010 sedangkan tingkat kekayaan daerah tertinggi adalah sebesar 0,2494 pada Kota Semarang tahun 2011.

Rata-rata Alokasi Belanja Daerah pada 35 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2009-2011 menunjukkan rata-rata sebesar 0,1348. Hal ini berarti 13,48% dari total belanja pada daerah Kabupaten/Kota adalah merupakan Belanja Modal. Nilai Belanja Daerah terkecil adalah sebesar 0,0279 yaitu pada Kabupaten Klaten tahun 2010 dan Belanja Daerah tertinggi adalah sebesar 0,3312 yaitu pada Kota Salatiga pada tahun 2009.

Rata-rata dana perimbangan berupa bagian dana dari Pemetintah pusat yang diperoleh 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2009-2011 menunjukkan rata-rata sebesar 0,7936. Hal ini berarti bahwa 79,36% total pendapatan daerah adalah berasal dari transfer daerah dari Pemerintah Pusat sebagai perimbangan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dana perimbangan terkecil adalah sebesar 0,5562 yaitu pada Kota Semarang pada tahun 2011, sedangkan Dana Perimbangan tertinggi adalah sebesar 0,8905 yang ada pada Kabupaten Batang tahun 2009.

Kinerja Pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata Kinerja IPM diperoleh sebesar 72,4766. Pada Tahun 2009 skor terendah adalah sebesar 67,69 yang diperoleh di Kabupaten Brebes dan Kinerja tertinggi pada tahun 2011 adalah sebesar 78,18 yang diperoleh di Kota Surakarta.

Data mengenai Status Daerah diukur dengan status pemerintahan Kabupaten atau Kota, dimana diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3
Status Daerah

Status	Jumlah	Persentase
Kabupaten	87	82,9
Kota	18	17,1
Total	105	100

Tabel 3 menunjukkan 105 data sebanyak 18 atau 17,1% adalah merupakan daerah Tingkat II dengan status Kota, sedangkan 82,9% lainnya adalah daerah dengan status Kabupaten.

Data mengenai Temuan Audit diukur dengan status opini auditor atas laporan keuangan Kabupaten atau Kota, dimana diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4
Temuan audit

Opini	Jumlah	Persentase
Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	3	2,9
Wajar Dengan Pengecualian	100	95,2
Wajar Tanpa Pengecualian	2	1,9
Total	105	100

Tabel 4 menunjukkan 105 data sebanyak 100 atau 95,2% mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan sebanyak 3 daerah Tidak Menerima Opini (*Disclaimer*) dan 2 daerah lain menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas terhadap masing-masing variabel dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Uji Normalitas Multivariate

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36679597
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.045
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.868
Asymp. Sig. (2-tailed)		.439

a. Test distribution is Normal.

Terlihat pada tabel 5, bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0.868 dengan nilai signifikansi jauh di atas 0.05 yang berarti Pengujian menggunakan *kolmogorov smirnov* test menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar $0,439 > 0,05$ dan tidak signifikan. Dengan demikian data dinyatakan berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolonieritas

Dari tabel 6, dapat dilihat bahwa hasil pengujian *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas pada antar variabel dalam model regres

Tabel 6
Uji multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
SIZE	0.406	2.466	Bebas multikolinieritas
KEKAYAAN	0.382	2.616	Bebas multikolinieritas
STATUS	0.263	3.809	Bebas multikolinieritas
BD	0.806	1.241	Bebas multikolinieritas
AUDIT	0.969	1.032	Bebas multikolinieritas
PERIMBANGAN	0.412	2.429	Bebas multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder yang diolah

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji Glejser. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Uji Heteroskedastisitas Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	18.222	11.475		1.588	.116
	SIZE	-.548	.381	-.225	-1.436	.154
	KEKAYAAN	-1.777	3.521	-.081	-.505	.615
	STATUS	-.152	.405	-.073	-.376	.708
	BD	-.942	1.715	-.061	-.549	.584
	AUDIT	-.121	.365	-.034	-.331	.741
	PERIMBANGAN	-2.100	1.826	-.179	-1.150	.253

a. Dependent Variable: AbsRes

4. Uji Autokorelasi

Untuk menguji autokorelasi digunakan uji Durbin Watson. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan residual adalah acak atau random. Berikut ini hasil uji autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 8
Uji Autokorelasi Model Regresi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.784 ^a	.614	.591	1.40802	2.163

a. Predictors: (Constant), PERIMBANGAN, TEMUAN, BD, SIZE, KEKAYAAN, STATUS

b. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2014.

Berdasarkan tabel 8, Hasil uji Durbin watson menunjukkan nilai DW dipeorleh sebesar 2,163 yang berada diantara $du = 1,80$ dan $4 - du = 2,20$. Dengan demikian nilai DW berada diantara du dan $4 - du$. Dengan demikian model regresi tidak memiliki masalah autokorelasi.

5. Hasil Pengujian Model Regresi.

Uji model dilakukan untuk memastikan bahwa model penelitian yang telah dirumuskan dapat diterapkan dalam penelitian ini. Uji model dilakukan dengan menggunakan F statistik. Hasil signifikansi dari F harus dibawah tingkat signifikansi alpha yang ditetapkan,yaitu 5%. Hasil pengujian model regresi dapat dilihat pada tabel 9.

Berdasarkan tabel 9, Hasil Tabel 9 perhitungan dapat kita ketahui bahwa F hitung (26,003) dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Karena probabilitas (0,000) lebih kecil Dri alpha 0,05.

Berdasarkan tabel 9 juga diketahui bahwa nilai *adjusted R square (R Square)* dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (adjusted R Square) adalah sebesar 0,591 atau 59,1%. Sedangkan sisanya sebesar 0,409 atau 40,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut.

Tabel 9
Uji Model

		Sum	of			
Model		Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	309.312	6	51.552	26.003	.000 ^a
	Residual	194.286	98	1.983		
	Total	503.598	104			

6. Hasil Pengujian Hipotesis.

Analisis linier berganda dipergunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Atas dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan sebesar tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10
Hasil analisis regresi linier berganda.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	72.812	20.151		3.613	.000
	SIZE	.039	.670	.006	.057	.954
	KEKAYAAN	12.564	6.183	.206	2.032	.045
	STATUS	3.229	.712	.556	4.538	.000
	BD	-1.328	3.012	-.031	-.441	.660
	TEMUAN	.481	.640	.048	.752	.454
	PERIMBANGAN	-4.333	3.206	-.132	-1.352	.180

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran.

Berdasarkan tabel 10, hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (ukuran daerah) menunjukkan bahwa ukuran daerah (*size*) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sesuai dengan koefisien regresi variabel ukuran daerah sebesar 0,039 menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Nilai t-statistik untuk variabel ukuran daerah adalah 0,057 dengan tingkat signifikansi sebesar dengan signifikansi sebesar 0,954 (lebih > 0,05) dan menghasilkan keputusan terhadap H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hal ini membuktikan bahwa ukuran daerah yang rendah maka kinerja pemerintah daerah juga rendah sehingga tidak memiliki total pendapatan yang cukup untuk membuat dan mengimplementasikan kinerja yang memadai di suatu daerah. Hasil Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ramasamy, Ong, dan Yeung (2005), Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriyani yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran (*size*) terhadap kinerja suatu entitas.

Berdasarkan tabel 10, hasil pengujian terhadap hipotesis kedua (tingkat kekayaan daerah) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah (*wealth*) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sesuai hasil koefisien regresi variabel tingkat kekayaan daerah sebesar 0,12564 menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Nilai t-statistik untuk variabel tingkat kekayaan daerah adalah 0,02032 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,045 (kurang < 0,05) dan menghasilkan keputusan terhadap H_0 ditolak dan H_1 diterima

Hal ini membuktikan semakin besar tingkat kekayaan daerah maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tingkat PAD yang meningkat di beberapa daerah dapat mempengaruhi meningkatnya total pendapatan dan infrastruktur kinerja pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fitriyani dan Pratolo (2009), Mustikarini dan Fitriyani (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kekayaan daerah dengan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 10, hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (Status daerah) menunjukkan bahwa status daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sesuai hasil koefisien regresi variabel status daerah sebesar 0.03229

menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Nilai t-statistik untuk variabel status daerah adalah 0,04538 dengan tingkat signifikansi sebesar dengan signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan menghasilkan keputusan terhadap H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jadi status daerah berpengaruh pada anggaran otonomi daerah yang mempunyai kewenangan mengatur anggaran kabupaten atau kota tersebut sehingga masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan anggaran dengan tujuan transparansi atau keterbukaan dalam anggaran.

Berdasarkan tabel 10, hasil pengujian terhadap hipotesis keempat (Dana perimbangan) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sesuai hasil koefisien regresi variabel dana perimbangan sebesar -0,00481 menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah negatif. Diperoleh nilai t sebesar -1,352 dengan signifikansi sebesar 0,180 ($> 0,05$) dan menghasilkan keputusan H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah dana perimbangan pada pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja Pemerintah daerah. Alasan tersebut masih terdapat kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, sehingga dapat mengurangi kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah dalam memajukan anggaran daerah beserta pajak daerah.

Berdasarkan tabel 10, hasil pengujian terhadap hipotesis kelima (Belanja daerah) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Sesuai hasil koefisien regresi belanja daerah sebesar 0,04333 diperoleh nilai koefisien regresi memiliki arah negatif. Diperoleh nilai t sebesar -0,441 dengan signifikansi sebesar 0,660. dengan tingkat signifikansi sebesar dengan signifikansi sebesar 0,954 ($> 0,05$) dan menghasilkan keputusan terhadap H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Untuk variabel belanja daerah, penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) membuktikan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 99%. Namun arah dari pengaruh variabel ini ternyata tidak sesuai dengan hipotesis, yaitu variabel belanja daerah terbukti berpengaruh negatif signifikan. Artinya semakin besar belanja daerah ternyata menyebabkan semakin kecil nilai kinerja Pemda tersebut.

Berdasarkan tabel 10, hasil pengujian terhadap hipotesis keenam (temuan audit) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Sesuai hasil koefisien regresi sebesar -0,01328 menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah negatif. Diperoleh nilai t sebesar 0,752 dengan signifikansi sebesar 0,454. ($> 0,05$) dan menghasilkan keputusan terhadap H_0 diterima dan H_1 .

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yaitu variabel temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota. Artinya, semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan terhadap hipotesis dalam penelitian, hasil menunjukkan bahwa dari 6 faktor yang diteliti (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, status daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan temuan audit BPK, terbukti bahwa tingkat kekayaan daerah dan status daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan, ukuran daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu terdapat perbedaan yang besar pada beberapa data karena berasal dari pengamatan wilayah yang berbeda. Untuk itu analisis selanjutnya dapat menggunakan metode Analisis regresi panel (*panel least square* atau *pool least square*) dengan menambahkan aspek *fixed effect* yang berasal dari masing-masing wilayah dan sekaligus dapat mengetahui wilayah mana yang memiliki pengaruh yang paling besar.

REFERENSI

- Abdullah, S. 2004. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Pendekatan Principal-Agency Theory*. Paper dipresentasikan pada Seminar Antar bangsa, Universitas Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.
- Damanpour, F. 1991. *Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators*. Academy of Management Journal, Vol. 34: 555-590.
- Fitriyanti, Ismi Rizky dan Pratolo, Suryo. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi*. Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Hadi, Abdul, Hendri, Sapto, dan Inapty, Biana Adha. 2009. *Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Hilmi, Amiruddin. Z.(2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009. Skripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Depok.
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. *Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Jurnal. Universitas Riau.
- Kusumawardani, Media. 2012. 'Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia'. *Accounting Analysis Journal 1*. Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Artikel I Tahun I Nomor 4 Patrick, P.A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania University.
- Mustikarini, Widya Astuti., Fitriyanti, Debby. 2012. 'Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007' *Symposium Nasional XV*: Banjarmasin.
- Purba, Adearman. (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun*. Tesis Pasca Sarjana. USU. Medan.
- Ramasamy, Bala, Ong, Darryl, and Yeung, Matthew C H. 2005. *Firm Size, Ownership and Performance in The Malaysian Palm Oil Industry*. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Vol. 1: 81-104.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta

- Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta.
- Rustiono, Deddy. (2008). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis S2. USU. Medan.
- Sudarmadji, Ardi Murdoko and Lana Sularto. 2007. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*. Proceeding Psychology, Economy, Art, Architect and Civil. Gunadarma University.
- Suhardjanto, Djoko., Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8/No.1/November 2011: 1-194*.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Virgasari, Aviva. 2009. *Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.